

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 29 Januari 2007
Waktu	: Pukul 10. ⁰⁰ WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membicarakan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2006 – 2007; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual di masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas Depnakertrans RI; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 39 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 8 orang Ijin.

Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pukul 10.³⁰ WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat Kerja didahului dengan pengantar Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan/jawaban Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan berbagai usul/saran/tanggapan para Anggota Komisi IX DPR RI Rapat Kerja menyimpulkan, maka sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI dan DEPNAKERTRANS R.I. sepakat untuk segera mengupayakan rapat koordinasi dengan Kepala BAPENAS, dan Menteri Keuangan dalam rangka memperjuangkan peningkatan anggaran DEPNAKERTRANS R.I. Tahun Anggaran 2008.
2. Komisi IX DPR RI sependapat dengan DEPNAKERTRANS R.I. tentang perlunya dilakukan Amandemen Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian agar dapat menjawab perkembangan kebutuhan yang lebih sesuai dengan perubahan lingkungan strategis program ketransmigrasian. Dan Komisi IX mendukung DEPNAKERTRANS R.I. dalam memperjuangkan agar RUU Amandemen Undang - Undang 15 Tahun 1997 dapat dimasukkan ke PROLEGNAS 2007.

3. Komisi IX DPR RI dan DEPNAKERTRANS R.I. sepakat untuk secara bersama-sama memperjuangkan diadakannya Rapat Kerja lintas komisi/lintas departemen untuk membahas kebijakan yang terkait dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pembangunan ketransmigrasian, terutama daerah perbatasan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak DEPNAKERTRANS R.I. untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK semester I Tahun 2006 di Dirjen P2TKLN DEPNAKERTRANS R.I.
5. Komisi IX DPR RI dan DEPNAKERTRANS R.I. sepakat untuk mengadakan pertemuan khusus untuk memberikan presentasi Program Kota Terpadu Mandiri.
6. Komisi IX DPR RI sepakat dengan DEPNAKERTRANS R.I. untuk mengadakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemda/DPRD yang tidak memanfaatkan BLK-BLK secara optimal.
7. Komisi IX DPR RI mendesak DEPNAKERTRANS R.I. untuk menindaklanjuti upaya penyelesaian kasus transmigrasi Kebun Damar Lampung Timur dan daerah lainnya.
8. Komisi IX DPR RI mendesak DEPNAKERTRANS R.I. untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian seluruh masalah ketransmigrasian di Provinsi Papua sekaligus mendorong DEPNAKERTRANS R.I. untuk memanfaatkan potensi ketersediaan lahan transmigrasi di Provinsi Papua.

Rapat di tutup pukul 16.⁴⁰ WIB

Jakarta, 29 Januari 2007

Pemerintah
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,

Erman Suparno

dr. Ribka Tjiptaning

